

# Analisis Pencitraan Walikota Medan Bobby Nasution Melalui Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021–2023

Sonia Gabriella Sitorus

Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail : [soniabiella01@gmail.com](mailto:soniabiella01@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1519 - 1532

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3029>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3029>

Article History:

Received: 24-06-2026

Revised: 30-07-2026

Accepted: 01-08-2026

**Abstract** : This study aims to analyze how infrastructure development policies for the 2021-2023 period were utilized as a tool to shape Bobby Nasution's political image during his tenure as Mayor of Medan, in line with his increasing political exposure ahead of his candidacy for Governor of North Sumatra. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical case study design. Data were collected through in-depth interviews and validated using source triangulation. Data analysis was conducted using a theory-driven approach based on Dan Nimmo's Political Image Theory (1989) and Brian McNair's Political Communication Theory (2020), through the stages of data reduction, data presentation, open coding, selective coding, and drawing conclusions. The research results indicate that road improvement programs through "Medan Membangun," river normalization for flood management, and the revitalization of Merdeka Square function as a medium for planned political image-building. These programs contribute to shaping Bobby Nasution's image as a credible, competent leader who cares about the community's needs. Nevertheless, the effectiveness of image-building through infrastructure development is conditional and depends on the sustainability of the quality of development as well as its alignment with the community's needs in an equitable manner.

**Keywords** : Political Image, Political Communication, Infrastructure Policy, Bobby Nasution, City of Medan.

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur periode 2021-2023 dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan citra politik Bobby Nasution selama menjabat Walikota Medan, seiring meningkatnya eksposur politik menjelang pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan pendekatan theory-driven analysis berdasarkan Teori Citra Politik Dan Nimmo (1989) dan Teori Komunikasi Politik Brian McNair (2020), melalui tahapan reduksi data, penyajian data, *open coding*, *selective coding*, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perbaikan jalan melalui "Medan Membangun", normalisasi sungai untuk penanganan banjir, dan revitalisasi Lapangan Merdeka berfungsi sebagai medium pencitraan politik yang terencana. Program-program tersebut berkontribusi dalam membentuk citra Bobby Nasution sebagai pemimpin yang kredibel, kompeten, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pencitraan melalui pembangunan infrastruktur bersifat kondisional dan bergantung pada keberlanjutan kualitas pembangunan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat secara merata.

**Kata Kunci** : Citra Politik, Komunikasi Politik, Kebijakan Infrastruktur, Bobby Nasution, Kota Medan.

## PENDAHULUAN

Pencitraan politik telah mengalami transformasi fundamental dari sekadar aktivitas pendukung menjadi inti strategi kekuasaan kontemporer. Aktor publik kini secara sistematis

memanfaatkan kebijakan berdampak langsung untuk membentuk persepsi masyarakat, dengan pembangunan infrastruktur menjadi instrumen yang paling efektif karena sifatnya yang kasat mata dan mudah diukur (McNair, 2020). Dalam konteks ini, masyarakat cenderung mengevaluasi kepemimpinan berdasarkan bukti visual ketimbang indikator abstrak, menjadikan infrastruktur sebagai jalur tercepat membangun kepercayaan publik. Lalancette & Raynauld (2017) mengkonfirmasi temuan ini melalui studi terhadap Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, yang secara strategis menggunakan platform visual untuk menampilkan kredibilitas kepemimpinannya melalui momen-momen kebijakan resmi. Senada dengan itu, studi terhadap enam kota besar Polandia oleh Masik *et al.* (2021) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur keras seperti transportasi dan energi masih mendominasi strategi pembangunan kota, sekaligus menjadi wajah paling kasat mata dari kinerja pemerintahan.

Komunikasi politik kontemporer memahami pencitraan sebagai proses konstruksi makna yang dilakukan secara sadar melalui pesan, simbol, dan kebijakan. Pemimpin tidak semata menjalankan fungsi administratif, melainkan menciptakan representasi tertentu yang ingin ditampilkan kepada publik. Pendekatan *framing* menjelaskan bagaimana realitas dapat dibentuk melalui cara penyampaian informasi, sebuah strategi komunikasi yang sah selama didasarkan pada capaian nyata, meskipun potensi bias tetap terbuka ketika kebijakan lebih diarahkan untuk kepentingan elektoral ketimbang kebutuhan substantif masyarakat (Howlett & Mukherjee, 2021). Dalam tradisi studi *personal branding* politik, Jain *et al.* (2018) mengidentifikasi dimensi kompetensi dan energi sebagai elemen kunci kepribadian merek pemimpin politik yang dipersepsikan positif oleh pemilih muda. Sementara itu, Dida *et al.* (2018) mendemonstrasikan bagaimana Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil membangun *personal branding* sebagai pemimpin tegas, inovatif, dan berani melalui kombinasi kebijakan transformatif dan eksposur media.

Di Indonesia, praktik pencitraan melalui kebijakan publik semakin menguat sejak era desentralisasi. Kepala daerah memiliki ruang luas merancang program yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lokal, tetapi juga memperkuat posisi politik mereka. Otonomi daerah memberikan kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran serta penentuan prioritas pembangunan, menciptakan peluang inovasi kepemimpinan sekaligus resiko penggunaan kebijakan sebagai alat legitimasi politik (Aspinall *et al.*, 2021). Hall (2024) memperlihatkan fenomena serupa di Kota Iloilo, Filipina, di mana keberhasilan pembangunan infrastruktur didorong oleh sinergi antara mesin politik lokal yang stabil dan akses terhadap pendanaan nasional, menciptakan konsensus elit yang melembaga untuk proyek-proyek katalis pertumbuhan. Namun, Williams *et al.* (2021) mengingatkan bahwa proyek infrastruktur berskala besar seperti Koridor Industri Delhi-Mumbai justru memperparah ketimpangan spasial dan sosial, menunjukkan bahwa narasi kemajuan seringkali bertolak belakang dengan realitas di lapangan.

Kota Medan sebagai salah satu metropolis terbesar di Indonesia menghadapi persoalan klasik perkotaan yang kronis seperti kemacetan, banjir, serta tata kota yang belum optimal. Sebelum periode kepemimpinan Bobby Nasution, permasalahan infrastruktur meliputi kerusakan jalan di kawasan padat penduduk, sistem drainase tidak memadai yang mengakibatkan banjir rutin, trotoar tidak terawat dan terokupasi pedagang kaki lima, serta degradasi fisik kawasan ikonik kota. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan publik, tetapi menciptakan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan kota secara keseluruhan. Dalam perspektif tata kelola perkotaan, Ahluwalia (2019) menekankan bahwa defisit infrastruktur perkotaan memerlukan reformasi kelembagaan yang memberdayakan pemerintah kota dengan kewenangan fiskal dan perencanaan yang lebih besar. Situasi ini menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai

kebutuhan mendesak sekaligus peluang politik bagi pemimpin daerah untuk menunjukkan kapasitasnya, di mana kebijakan pembangunan berfungsi ganda sebagai solusi teknis dan simbol keberhasilan kepemimpinan (Bappenas, 2023).

Sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan pada tahun 2021, Bobby Nasution menunjukkan fokus signifikan pada sektor pembangunan infrastruktur. Berbagai program diluncurkan mencakup perbaikan jalan, revitalisasi kawasan, hingga penanganan banjir. Intensitas pembangunan yang tinggi dalam waktu relatif singkat mengindikasikan strategi terencana dalam membangun citra sebagai pemimpin responsif terhadap persoalan publik (Kementerian PUPR, 2023). Dalam perspektif teori kepemimpinan politik, tindakan berorientasi hasil nyata sering digunakan memperkuat legitimasi kekuasaan. Pemimpin yang mampu menunjukkan kinerja konkret cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat (Fiorina, 1992). Farhan *et al.* (2020) memperkuat argumen ini melalui studi kuantitatif terhadap pemilih Indonesia yang menunjukkan bahwa kepuasan merupakan prediktor terkuat keterlibatan merek politik, sementara kepercayaan menjadi prediktor terkuat perilaku kewargaan pemilih.

Fenomena menguatnya intensitas pembangunan infrastruktur di Kota Medan selama periode 2021–2023 yang beriringan dengan meningkatnya eksposur politik Bobby Nasution menimbulkan pertanyaan kritis mengenai orientasi kebijakan yang dijalankan, apakah semata-mata berlandaskan kebutuhan masyarakat atau memiliki dimensi pencitraan politik. Dalam kajian kebijakan publik, situasi ini sering dikaitkan dengan upaya aktor politik meningkatkan popularitas melalui program yang mudah dikenali publik. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan persepsi di masyarakat terhadap hasil pembangunan. Sebagian kelompok menilai kebijakan tersebut membawa perubahan signifikan, sementara pandangan lain menyebutkan beberapa program belum memberikan dampak optimal. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara citra yang dibangun dengan realitas yang dirasakan (UNDP, 2022).

Strategi komunikasi yang digunakan Bobby Nasution dalam menyampaikan keberhasilan pembangunan juga menjadi perhatian penting. Di era digital, penyebaran informasi tidak lagi bergantung pada media konvensional, melainkan bertumpu pada platform daring yang memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat. Bobby Nasution diketahui aktif memanfaatkan media sosial untuk menampilkan capaian kinerjanya, menunjukkan adanya upaya sistematis membangun citra melalui komunikasi digital. Hadjira & Suranto (2023) menemukan pola serupa pada strategi personal political branding Ganjar Pranowo melalui Twitter, di mana atribut kompetensi, gaya kepemimpinan positif, dan empati ditampilkan secara konsisten. Athahirah (2024) juga mendemonstrasikan bagaimana pemimpin daerah milenial di Sumatera Barat berhasil membangun popularitas dan elektabilitas melalui brand mantra kolaboratif, inovatif, dan muda yang diintegrasikan melalui platform daring dan luring.

Terdapat pula indikasi bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan memiliki nilai strategis dalam konteks politik jangka panjang. Proyek-proyek dengan visibilitas tinggi cenderung dipilih karena mampu memberikan dampak simbolik kuat. Dalam teori politik elektoral, langkah ini sering digunakan untuk meningkatkan peluang dalam kontestasi berikutnya. Namun, efektivitas strategi ini tidak selalu linear. Sebagaimana diperlihatkan Udoh & Luna-Reyes (2025) dalam studi terhadap 99 kota di Amerika Serikat, keberhasilan adopsi proyek kota pintar sangat bergantung pada kombinasi aspek tata kelola teknis dan legitimasi yang melibatkan partisipasi warga dan kemitraan, bukan semata-mata pada kemegahan infrastruktur yang dibangun.

Keterbatasan kajian akademik yang secara spesifik membahas hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pencitraan politik di tingkat lokal, khususnya di Kota Medan, menjadi kesenjangan literatur yang perlu diisi. Meijer & Bolívar (2016) dalam tinjauan sistematis

tata kelola kota pintar merekomendasikan agar penelitian ke depan lebih fokus pada analisis sosio-teknis, transformasi kelembagaan, dan politik dalam pilihan teknologi perkotaan. Rekomendasi ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan infrastruktur di Medan dikonstruksi, dikomunikasikan, dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pencitraan Bobby Nasution melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Medan periode 2021–2023 secara sistematis. Secara spesifik, penelitian ini mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan serta menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga membentuk citra politik Bobby Nasution. Pendekatan teori citra politik dan komunikasi politik digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dikonstruksi, dikomunikasikan, serta diterima oleh publik. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara akademik dalam pengembangan studi komunikasi politik dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai dinamika politik daerah di Indonesia serta meningkatkan literasi politik masyarakat dalam menganalisis pesan-pesan politik secara kritis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses pembentukan citra politik Walikota Medan Bobby Nasution melalui kebijakan pembangunan infrastruktur periode 2021–2023. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena pencitraan politik memerlukan pemahaman terhadap persepsi, pengalaman, dan pandangan para aktor yang terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata yang tidak dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Yin, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan *theory-driven analysis* berdasarkan Teori Citra Politik Nimmo (1989) dan Teori Komunikasi Politik McNair (2020).

Penelitian dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai lokus utama fenomena yang diteliti. Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kapasitas pengetahuan, dan kedekatan terhadap fenomena penelitian. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, sedangkan Patton (2015) menegaskan bahwa teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan mendalam dari sumber yang paling relevan. Kriteria informan meliputi pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai perumusan, implementasi, dan dampak kebijakan publik pada masa kepemimpinan Bobby Nasution, pemahaman mengenai citra politiknya, serta wawasan tentang dinamika politik Sumatera Utara. Informan penelitian terdiri atas Dr. Jonson Rajagukguk, S.Sos., S.E., M.AP. dan Jadi Pane, S.Pd., M.M. selaku tim sukses Bobby Nasution, Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol. sebagai akademisi kebijakan publik, Muhammad A.N. selaku Kepala Bapenda Kota Medan dan P. Pasaribu selaku Kabid Infrastruktur Bappeda Kota Medan yang mewakili Aparatur Sipil Negara, serta Tengku Indra Abadi sebagai representasi masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi isu secara fleksibel (Kvale & Brinkmann, 2009). Wawancara difokuskan pada pemahaman informan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur, strategi



komunikasi politik yang digunakan, dan persepsi terhadap citra politik Bobby Nasution. Selain itu, observasi non-partisipan dilakukan pada kegiatan publik dan implementasi kebijakan di lapangan untuk mengamati kesesuaian antara komunikasi politik dan praktik pemerintahan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi RPJMD, program unggulan Pemerintah Kota Medan, peraturan daerah, pidato dan pernyataan resmi Bobby Nasution, pemberitaan media massa, serta konten media sosial resmi Bobby Nasution dan Pemerintah Kota Medan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikemukakan Braun & Clarke (2006), melalui proses identifikasi, pengkodean, dan kategorisasi tema-tema yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, *open coding*, *selective coding*, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, analisis konten digunakan untuk mengkaji bagaimana media massa dan media sosial membingkai kebijakan pembangunan infrastruktur serta merepresentasikan citra politik Bobby Nasution.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Denzin (2007) menjelaskan bahwa triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi informasi melalui berbagai sumber data sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Pendekatan ini juga membantu meminimalkan potensi bias peneliti melalui penggunaan berbagai sumber informasi (Nurfajriani *et al.*, 2024). Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas narasumber, dan memastikan penggunaan data semata-mata untuk kepentingan akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kota Medan dan Profil Bobby Nasution

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus kota terbesar ketiga di Indonesia dengan luas wilayah 265,10 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 2.435.252 jiwa pada tahun 2022 (BPS Kota Medan, 2023). Secara historis, Medan berkembang dari perkampungan kecil di tepi Sungai Deli yang didirikan Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590, kemudian bertransformasi menjadi pusat ekonomi plantation setelah Jacobus Nienhuys mendirikan perkebunan tembakau di Deli pada tahun 1863 (Saragih *et al.*, 2024). Kota ini merupakan kota multietnis dengan keberagaman kelompok etnis seperti Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Melayu, Jawa, dan Tionghoa yang membentuk dinamika sosial, budaya, dan politik lokal yang unik. Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., lahir di Bandung pada 26 Juli 1991, berhasil memenangkan Pemilihan Walikota Medan tahun 2020 berpasangan dengan Aulia Rachman dan resmi dilantik pada 26 Februari 2021 (Damanik *et al.*, 2022). Visi kepemimpinannya adalah "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif" dengan tujuh misi yang salah satunya secara eksplisit menempatkan "Medan Membangun" sebagai pilar utama pembangunan infrastruktur perkotaan.

### Identifikasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021–2023

Berdasarkan wawancara mendalam dengan enam informan, analisis dokumen, dan observasi lapangan, teridentifikasi tiga kategori utama kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Bobby Nasution. Temuan ini menunjukkan pola konsisten mengenai jenis dan orientasi proyek yang menjadi prioritas, di mana setiap proyek mengandung kalkulasi pencitraan terencana di samping nilai fungsionalnya, sejalan dengan kerangka teori citra politik Nimmo (1989) dan teori komunikasi politik McNair (2020).

Kategori pertama adalah program perbaikan jalan "Medan Membangun" yang berhasil memperbaiki lebih dari 1.200 km jalan dalam tiga tahun, menjadikannya kebijakan infrastruktur

paling masif yang langsung membentuk persepsi publik. Tengku Indra Abadi, representasi masyarakat Kota Medan, memberikan penilaian konkret: *"Bobby Nasution berani melakukan perubahan misalnya beberapa jalan... dia membuat jalanan tidak macet dengan membuat jalan layang dengan terowongan dan sudah berkurangnya kemacetan, ya artinya Medan menjadi tempat yang nyaman. Kalau dari infrastruktur kita bisa kasih nilai 90, ya cukup lumayan itu. Itu infrastruktur dan artinya itu memang menjadi kebutuhan Masyarakat Kota Medan sendiri."* Pengakuan ini mencerminkan bahwa program perbaikan jalan tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga meresap ke dalam kesadaran publik sebagai bukti kinerja nyata. McNair (2020) menyebutkan bahwa perubahan fisik yang dapat diamati langsung merupakan pesan politik paling efektif karena infrastruktur berbicara sendiri kepada publik tanpa memerlukan mediasi.

Dari perspektif perencanaan teknokratis, P. Pasaribu selaku Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Medan menjelaskan bahwa proses perencanaan mengikuti siklus formal Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota yang dipadukan dengan kajian teknis Dinas PU, Perkim, dan Dinas Perhubungan. Ia menambahkan pergeseran fokus dari infrastruktur skala besar menuju infrastruktur yang lebih dekat dengan keseharian warga: *"dibandingkan periode sebelumnya, terdapat pergeseran fokus dari infrastruktur skala besar menuju infrastruktur yang lebih dekat dengan keseharian warga, seperti jalan lingkungan dan drainase skala kelurahan."* Pergeseran skala proyek dari infrastruktur ikonik menuju infrastruktur kewargaan sehari-hari merupakan strategi citra yang lebih canggih karena menyentuh pengalaman harian pemilih secara langsung dan berulang, bukan sekadar simbolik satu kali. Hal ini sejalan dengan kerangka Howlett & Mukherjee (2021) tentang kecenderungan aktor politik memanfaatkan program yang mudah dikenali publik untuk meningkatkan popularitas.

Kategori kedua adalah revitalisasi Lapangan Merdeka sebagai proyek paling sarat nilai simbolik. Tengku Indra Abadi memberikan perspektif ilustratif: *"Saya melihat mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka dulu kan jadi tempat restoran-restoran mahal. Sebenarnya di kota-kota lain tuh ada ikon alun-alun. Medan kok nggak ada? Tapi semenjak ada Bobby ini, dikembalikan lagi. Terus gedung-gedung lama di Kesawan yang jadi destinasi."* Perspektif ini mengonfirmasi bahwa revitalisasi Lapangan Merdeka berhasil menciptakan apa yang oleh Nimmo (1989) disebut sebagai *political landmark*, yaitu simbol fisik yang melekat pada identitas seorang pemimpin. Kawasan ini kemudian menjadi latar konten media sosial pemerintahan Bobby Nasution secara berulang, mengonfirmasi bahwa revitalisasi ini dirancang tidak hanya untuk fungsi publik tetapi juga sebagai aset visual komunikasi politik yang berkelanjutan. Namun demikian, Alwi Dahlan Ritonga mencatat dimensi kritis: *"Ada infrastruktur-infrastruktur yang monumental itu seperti Lapangan Merdeka, walaupun ya kan meninggalkan beberapa persoalan. Contohnya itu kan seharusnya bisa jadi ruang publik lagi."*

Kategori ketiga adalah proyek-proyek berskala besar yang melibatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta. Muhammad A.N selaku Kepala BAPENDA Kota Medan menjelaskan: *"proyek-proyek besar seperti Stadion Kebun Bunga dibangun bersinergi dengan pemerintah pusat, dan beberapa proyek lain seperti Lapangan Gajah Mada serta revitalisasi Taman Cadika melibatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta."* Pola ini menunjukkan bahwa pembiayaan infrastruktur tidak sepenuhnya bersumber dari APBD, melainkan memanfaatkan kemitraan strategis yang berpotensi mempercepat realisasi proyek sekaligus memperluas legitimasi politik lintas tingkat pemerintahan. Temuan ini selaras dengan studi Hall (2024) tentang sinergi nasional-lokal di Kota Iloilo, Filipina, di mana keberhasilan infrastruktur didorong oleh akses terhadap pendanaan nasional dan stabilitas politik lokal.

### **Analisis Pencitraan Politik Berbasis Teori Citra Politik Dan Nimmo**

Mengacu pada kerangka Teori Citra Politik Dan Nimmo (1989), temuan wawancara dikelompokkan ke dalam lima indikator citra politik: kredibilitas, kepercayaan, kompetensi, kepedulian, dan reputasi politik. Dr. Jonson Rajagukguk memberikan jawaban tegas bahwa: *"Saya menilai itu adalah strategi politik yang sistematis, terencana dengan tujuan untuk membangun image dan menarik simpati masa. Penekanan saya lebih pada aspek strategi politik murni sebagai bagian dari pilkada."* Sementara itu, Tengku Indra Abadi memberikan jawaban lebih nuansatif: *"Saya menilai itu kedua-duanya karena itu berjalan beriringan dan memang harus demikian."* Temuan ini sejalan dengan kerangka Nimmo (1989) bahwa citra politik merupakan konstruksi psikologis yang dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, dan komunikasi yang dikemas secara strategis.

Pada indikator kredibilitas, Alwi Dahlan Ritonga menilai keberhasilan pembangunan secara umum positif dengan skor 80, namun menggarisbawahi bahwa kredibilitas tersebut tidak bebas dari persoalan: *"kredibilitas ya sekredibel-kredibelnya dia tetap aja ada persoalan-persoalan, seperti lampu pocong itu, soal lapangan merdeka itu pun kan dianggap ada kong kali kong."* Temuan ini diperkuat Muhammad A.N yang mengakui adanya insiden "lampu pocong" pada proyek penerangan jalan: *"kalau gak ada lampu pocong mulus jalur lupa dan terkait infrastruktur, karena lampu pocong itu aja jadi cacat dan akhirnya pun masyarakat anggap kesalahan totalnya, padahal sebenarnya tidak gitu."* Kasus ini merupakan contoh klasik bagaimana satu insiden negatif dapat mengancam citra yang dibangun melalui ratusan proyek positif, memperkuat argumen McNair (2020) bahwa dalam era media sosial, manajemen krisis komunikasi menjadi sama pentingnya dengan substansi kinerja itu sendiri.

Indikator kepercayaan tampak paling kuat terbentuk melalui asosiasi politik Bobby Nasution dengan Presiden Joko Widodo. Alwi Dahlan Ritonga mengidentifikasi dua faktor dominan: *"Faktor yang paling berpengaruh terhadap citra politik dia, kalau saya lihat berdasarkan survei-survei juga, ya karena kedekatan dia dengan Jokowi. Dan yang kedua mungkin ya karena dia representasi kaum muda."* Dalam perspektif teori komunikasi politik McNair (2020), ini merupakan manifestasi dari halo effect dalam pencitraan politik, di mana asosiasi dengan figur yang dipercaya dapat secara signifikan meningkatkan persepsi positif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panjaitan & Harahap (2021) yang menemukan bahwa identitas Bobby sebagai politisi muda dari dinasti politik Jokowi menjadi faktor pembentuk opini publik. Tengku Indra juga menyiratkan kalkulasi politik jangka panjang: *"Ketika manusia sudah duduk di pemerintahan, manusia itu akan ingin menduduki yang lebih tinggi. Dengan cara dia harus mencari citranya kepada Masyarakat khususnya di kota medan agar Ketika dia ingin naik yang lebih tinggi, ada dukungan suara."*

Pada indikator kompetensi, P. Pasaribu menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Bobby Nasution yang menekankan kecepatan eksekusi mendorong percepatan siklus perencanaan-penganggaran: *"gaya kepemimpinan pak Bobby Nasution yang menekankan kecepatan eksekusi dan responsivitas terhadap keluhan publik umumnya mendorong Bappeda dan dinas teknis untuk mempercepat siklus perencanaan penganggaran... hal ini bisa mendorong inovasi proses digitalisasi pengaduan, dashboard monitoring proyek."* Sementara Tengku Indra memberikan penilaian dari sudut pandang warga: *"kalau dari infrastruktur kita bisa kasih nilai 8... itu memang menjadi kebutuhan Masyarakat Kota Medan sendiri."* Terdapat celah epistemik yang penting: narasi kompetensi Bobby Nasution dibangun di atas dua bahasa berbeda, yaitu bahasa birokrasi yang berbicara soal kecepatan proses dan bahasa warga yang berbicara soal kepuasan hasil, namun keduanya dipertemukan seolah saling mengonfirmasi. Birokrasi yang dipaksa bekerja lebih cepat tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang lebih baik; ia bisa menghasilkan kompromi

terhadap kajian kelayakan teknis demi memenuhi tempo politik, sebagaimana insiden "lampu pocong" yang muncul dari proyek yang dikerjakan dalam tekanan kecepatan.

Indikator kepedulian banyak dikaitkan dengan pemilihan proyek infrastruktur skala kewargaan yang menyentuh kebutuhan harian masyarakat. P. Pasaribu menjelaskan pergeseran fokus didorong akumulasi keluhan warga: *"biasanya teridentifikasi pergeseran fokus dari pembangunan infrastruktur skala besar atau strategis kota ke infrastruktur yang lebih dekat dengan keseharian warga seperti jalan lingkungan, drainase skala kelurahan, fasilitas publik kecil."* Tengku Indra menegaskan: *"Lapangan merdeka itu memang untuk kebutuhan warga. Kita butuh sarana olahraga, kita butuh tempat untuk healing."* Temuan ini konsisten dengan hasil studi Damanik *et al.* (2022) bahwa kemampuan membangun koneksi emosional dengan pemilih merupakan kunci keberhasilan elektoral. Jain *et al.* (2018) juga mengidentifikasi dimensi ketulusan dan keramahan sebagai elemen penting kepribadian merek pemimpin politik yang dipersepsikan positif oleh pemilih.

Pada indikator reputasi politik, temuan menunjukkan dimensi yang paling eksplisit dikaitkan dengan ambisi elektoral menuju jabatan Gubernur Sumatera Utara. Alwi Dahlan Ritonga menyebut adanya unsur kesengajaan dalam membangun legasi: *"sebelum habis masa kredisi dia, buru-buru dia meresmikan lapangan merdeka itu... padahal belum 100 persen, tapi dia udah harus ini... dia tuh pengen diingat masyarakat Kota Medan sebagai orang yang melakukan pembangunan."* Muhammad A.N mengaitkan reputasi politik dengan dinamika anggaran: *"dengan intensitas infrastruktur yang tinggi, otomatis PAD juga harus bikin jot, karena Pak Bobby dan tim pada saat itu kan pasti sudah ada perencanaan... PAD harus digenjot untuk mendapatkan minimal sekian."* Fenomena percepatan peresmian sebelum masa jabatan berakhir merupakan bukti empiris paling kuat tentang dimensi kalkulatif dari strategi pencitraan, mencerminkan rasionalitas aktor politik yang bekerja dalam logika *time-bounded political investment*.

### **Komunikasi Politik dalam Diseminasi Capaian Pembangunan: Analisis Berbasis Teori Brian McNair**

Dimensi komunikasi politik merupakan elemen krusial dalam pembentukan pencitraan. Dr. Jonson Rajagukguk dan Jadi Pane menilai komunikasi melalui media massa sebagai instrumen paling efektif: *"Komunikasi melalui media massa lebih efektif karena jangkauan dan capaian yang banyak, dan kemudahan akses karena semua warga sudah rata-rata punya akun. Ini sangat efektif membentuk persepsi publik."* Muhammad A.N memberikan analisis komparatif mengenai inovasi strategi komunikasi: *"Di zaman Pak Bobby dengan sebelumnya itu strategi komunikasinya jauh berbeda. Jauh lebih maju, mungkin Pak Bobby mengadopsi strategi politik, strategi komunikasi Pak Jokowi. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti cara di media sosial. Influencer itu dirangkul, itu yang tidak ada di masa pemerintahan sebelumnya."*

Sebagai komunikator politik, Bobby Nasution diidentifikasi memiliki strategi komunikasi yang jauh lebih maju dibandingkan kepala daerah sebelumnya. Pertama, media sosial khususnya Instagram dan TikTok dimanfaatkan secara intensif. Alwi Dahlan Ritonga menjelaskan efektivitas pesan politik yang disampaikan: *"infrastruktur bersifat fotogenik dan tangible. Jalan mulus, taman tertata, kawasan yang direvitalisasi mudah dikemas menjadi konten yang kuat. Ditambah pengelolaan media sosial yang agresif dari narasi pembangunan warisan Jokowi, media cenderung memperkuat citranya sebagai pemimpin yang 'bekerja nyata'."* Penggunaan influencer media sosial merupakan implementasi dari apa yang oleh Baihaqi *et al.* (2022) identifikasi sebagai pass marketing, yaitu strategi memperoleh dukungan dari tokoh berpengaruh untuk memperluas jangkauan pesan. Strategi ini terbukti efektif menjangkau segmen pemilih muda yang aktif di media sosial namun tidak selalu mengikuti pemberitaan politik konvensional. Kedua, media massa konvensional dimanfaatkan melalui *press release*, konferensi pers, dan kegiatan liputan. Ketiga,



kegiatan seremonial seperti groundbreaking dan peresmian proyek dimanfaatkan sebagai momen komunikasi politik yang efektif, yang oleh McNair (2020) disebut sebagai *manufactured newsworthy moments*.

Pada unsur media politik, P. Pasaribu menjelaskan pembagian peran antara Bappeda dan Diskominfo: *"Bappeda berperan sebagai penyedia data capaian progres fisik, lokasi, manfaat yang diteruskan ke Diskominfo untuk dikemas menjadi materi publikasi... strategi framing komunikasi politik itu ranah Diskominfo atau tim komunikasi pimpinan daerah."* Pemisahan ini merupakan mekanisme pencitraan yang lebih canggih karena memberi legitimasi teknokratis-administratif terhadap narasi yang sebenarnya dirancang secara politis. Ketika *framing* dinyatakan bukan ranah Bappeda, pernyataan tersebut secara tidak langsung mengkonfirmasi adanya pembagian peran yang sengaja memisahkan "fakta teknis" dari "narasi politik" agar yang pertama tampak objektif sementara yang kedua leluasa dibentuk. P. Pasaribu juga membedakan pendekatan komunikasi: *"komunikasi proyek skala besar seperti jalan utama dan jembatan cenderung memakai pendekatan seremonial, contohnya peresmian, publikasi media massa... proyek besar lebih mudah terlihat, sementara dampak proyek kecil kadang kurang terekspos meski dirasakan langsung oleh warga."*

Pada unsur khalayak dan efek komunikasi politik, Tengku Indra mengonfirmasi efektivitas strategi komunikasi digital: *"sangat efektif. Kan saat ini memang sudah jamannya media sosial. Kalau kita nggak tampilkan di media sosial, gimana masyarakat mau tahu? Kan itu juga bisa jadi sarana masyarakat untuk mengkritik/memberikan saran kepada bobby nasution."* Berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kota Medan Tahap II Periode Juli-September 2022 di 21 kecamatan dengan 600 responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution mencapai 77,7 persen. Namun Alwi Dahlan Ritonga mengingatkan bahwa efek komunikasi politik yang positif ini bersifat rentan: *"Ancaman utama datang dari framing lewat infrastruktur dalam membangun pencitraan elektoral terutama jika proyek gencar dilakukan menjelang momentum politik. Media investigatif yang membongkar transparansi anggaran atau kualitas konstruksi... bisa meruntuhkan narasi tersebut dengan cepat."* Peringatan ini sejalan dengan temuan Williams *et al.* (2021) tentang bagaimana narasi kemajuan infrastruktur seringkali bertolak belakang dengan realitas di lapangan dan menimbulkan konflik yang belum terselesaikan.

### Dimensi Kondisional dan Risiko Pencitraan

Salah satu temuan penting adalah sifat kondisional dari pencitraan berbasis infrastruktur. Alwi Dahlan Ritonga menjelaskan: *"kebijakan publik yang ideal itu kan semestinya kebijakan publik yang betul-betul berangkat dari kemauan, keinginan atau berangkat dari masalah yang ada di bawah, baru kemudian dirumuskan dibuat kebijakan dari atas."* Muhammad A.N memberikan ilustrasi konkret melalui perbandingan dua proyek besar: *"Jadi 50:50 ya. Lapangan merdeka mungkin lebih ke politis, karena mungkin Pak Bobby ini ingin meninggalkan legasi... Berbeda dengan Stadion Selayang. Stadion Selayang kan memang dari sisi politis ada, tapi dari sisi keinginan masyarakat juga ada."* Perbandingan ini membedah dua jenis legitimasi: legitimasi simbolik-elektoral (Lapangan Merdeka yang buru-buru diresmikan sebelum 100 persen) dan legitimasi fungsional-substantif (Stadion Kebun Bunga yang menuai dukungan luas). Bobby Nasution menjalankan dua jalur pencitraan sekaligus: satu jalur untuk legasi simbolik jangka pendek menjelang kontestasi politik, dan satu jalur lain untuk membangun kepercayaan jangka panjang berbasis kebutuhan riil.

Alwi Dahlan Ritonga menegaskan sifat kondisional ini: *"Kebijakan infrastruktur berkontribusi besar namun kondisional terhadap citra Bobby Nasution... keberlanjutan citra itu sangat bergantung pada apakah pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat luas,"*

*bukan sekadar kepentingan elektoral."* Perspektif normatif yang ia tawarkan penting secara akademis: *"Ketika pemimpin berlomba-lomba untuk melakukan, membuat semacam supaya dia punya legasi, lalu kemudian dia buat pembangunan infrastruktur itu bagus menurut saya. Itulah yang kita ambil pelajaran dari ini... itu jauh lebih bagus ketimbang pemimpinnya takut, nggak berani bikin ini, nggak berani bikin itu, terakhir nggak ada yang ditinggalkan."* Hal ini sejalan dengan argumen McNair (2020) bahwa komunikasi politik yang efektif bukan hanya tentang spin dan manipulasi, tetapi juga tentang kemampuan pemimpin mengkomunikasikan kinerja nyata secara efektif. Temuan ini juga memperkuat studi Farhan *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa kepuasan merupakan prediktor terkuat keterlibatan merek politik, sementara kepercayaan menjadi prediktor terkuat perilaku kewargaan pemilih.

### Korelasi dengan Penelitian Terdahulu dan Sintesis Triangulasi

Penelitian ini memperlihatkan keterkaitan sekaligus perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu. Terhadap penelitian Panjaitan & Harahap (2021) tentang *personal branding* Bobby Nasution pada masa pencalonan 2020 yang menyimpulkan upaya *personal branding* saat itu kurang optimal, temuan ini menunjukkan pergeseran signifikan pasca menjabat: pencitraan yang semula bertumpu pada narasi personal-individual bertransformasi menjadi pencitraan berbasis kinerja kebijakan (*policy-based image*) yang lebih efektif karena dapat diverifikasi secara material. Terhadap penelitian Baihaqi *et al.* (2022) mengenai strategi *push*, *pull*, dan *pass marketing* di media sosial masa Pilkada 2020, temuan ini mengonfirmasi keberlanjutan pola tersebut pasca-pemilihan dengan substansi konten berupa capaian pembangunan infrastruktur. Terhadap penelitian Nasution *et al.* (2023) tentang transformasi kepemimpinan dalam birokrasi, temuan ini memberikan kedalaman kualitatif dengan menunjukkan mekanisme konkret berupa percepatan siklus perencanaan-penganggaran dan digitalisasi dashboard monitoring. Terhadap penelitian H. A. M. Panjaitan *et al.* (2020) yang menempatkan infrastruktur sebagai variabel ekonomi murni, penelitian ini memperluas perspektif dengan menunjukkan fungsi politik-simbolik yang eksplisit.

Posisi penelitian ini menunjukkan garis evolusi naratif tentang Bobby Nasution: dari *personal branding* individu (2020), strategi kampanye digital (2020), kinerja kepemimpinan birokratis (2023), hingga kebijakan publik sebagai instrumen citra (2021–2023). Evolusi ini memperlihatkan bagaimana sebuah dinasti politik modern beradaptasi: dari mengandalkan *personal branding* yang terbukti rentan dan kontroversial, bergeser menuju strategi yang jauh lebih sulit dibantah secara publik, yaitu kinerja kebijakan yang dapat dilihat, diukur, dan didokumentasikan. Pencitraan berbasis kebijakan jauh lebih sukar diserang lawan politik dibandingkan pencitraan berbasis *personal branding* semata, karena ia menyembunyikan motif elektoral di balik klaim manfaat publik yang sulit dibantah secara normatif. Dalam konteks demokrasi lokal Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh personalisasi kekuasaan dan warisan dinasti politik sebagaimana diuraikan Aspinall & Berenschot (2021), fenomena ini semestinya menjadi peringatan akademik bahwa keberhasilan pembangunan fisik tidak boleh secara otomatis dibaca sebagai keberhasilan tata kelola pemerintahan yang substantif, melainkan harus terus diuji melalui mekanisme akuntabilitas publik yang independen dari narasi pencitraan itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan temuan, jawaban atas pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: pencitraan Bobby Nasution dibangun melalui mekanisme yang terencana dan sistematis, memanfaatkan sifat infrastruktur yang konkret dan fotogenik sebagai medium komunikasi politik, didukung oleh warisan jejaring politik nasional melalui kedekatan dengan Presiden Jokowi serta adaptasi strategi komunikasi digital, dengan keberlanjutan citra yang sangat

bergantung pada konsistensi kualitas pembangunan dan pemerataan manfaatnya bagi masyarakat luas, bukan sekadar visibilitas elektoral menjelang kontestasi politik yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Bobby Nasution selama periode 2021–2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam pembentukan citra politik. Tiga program utama yang teridentifikasi, yaitu perbaikan jalan melalui program Medan Membangun, normalisasi sungai untuk penanganan banjir, dan revitalisasi Lapangan Merdeka, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi medium yang efektif dalam membangun persepsi publik terhadap kepemimpinan Bobby Nasution. Efektivitas pembentukan citra tersebut didukung oleh strategi komunikasi politik yang dilakukan secara sistematis melalui berbagai saluran komunikasi, baik media sosial, media massa, kegiatan seremonial, maupun komunikasi langsung melalui forum-forum partisipatif masyarakat.

Berdasarkan Teori Citra Politik Dan Nimmo (1989), kebijakan pembangunan infrastruktur paling dominan berkontribusi terhadap pembentukan dimensi kompetensi dan kepedulian. Dimensi kompetensi tercermin dari persepsi informan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan dan merespons permasalahan infrastruktur perkotaan, sedangkan dimensi kepedulian terlihat dari pemilihan program yang dinilai dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa citra politik yang dibangun melalui kebijakan publik bersifat kondisional. Permasalahan dalam pelaksanaan proyek maupun kontroversi yang muncul di ruang publik berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas pemimpin.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran strategi pembentukan citra politik Bobby Nasution dibandingkan masa pencalonan tahun 2020. Jika pada masa kampanye pencitraan lebih banyak bertumpu pada *personal branding* dan komunikasi politik digital, maka pada periode kepemimpinan 2021–2023 pembentukan citra lebih banyak didasarkan pada capaian kebijakan yang dapat diamati secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki fungsi pembangunan fisik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik yang memperkuat citra kepemimpinan di tingkat lokal. Keberlanjutan citra tersebut pada akhirnya bergantung pada kualitas pembangunan, konsistensi implementasi kebijakan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang mengintegrasikan perspektif citra politik, komunikasi politik, dan kebijakan publik guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan citra kepala daerah. Selain itu, studi komparatif antar-daerah perlu dilakukan untuk menguji apakah pola pencitraan berbasis pembangunan infrastruktur yang ditemukan di Kota Medan juga terjadi pada konteks daerah lain di Indonesia. Penggunaan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan analisis kuantitatif media sosial dengan wawancara mendalam juga dapat memperkaya validitas dan kedalaman temuan penelitian.

Bagi pemerintah daerah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu terus didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi melalui mekanisme partisipatif, termasuk Musrenbang dan berbagai forum konsultasi publik. Transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi proyek juga perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dijalankan.

Bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, peningkatan literasi politik dan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan perlu terus didorong agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara lebih objektif dan berbasis pada manfaat kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi sarana peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, terhadap pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang mendalam selama proses pengumpulan data: Dr. Jonson Rajagukguk, S.Sos., SE., M.AP dan Bapak Jadi Pane, S.Pd., MM selaku tim sukses Bobby Nasution; Bapak Muhammad A.N selaku Kepala Bapenda Kota Medan dan Bapak P. Pasaribu selaku Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Medan yang telah memberikan perspektif teknokratis dari dalam birokrasi; Bapak Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol selaku akademisi yang memperkaya analisis dengan kerangka keilmuan kebijakan publik; serta Bapak Tengku Indra Abadi yang mewakili suara masyarakat Kota Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, I. J. (2019). Urban governance in India. *Journal of Urban Affairs*, 41(1), 83–102. <https://doi.org/10.1080/07352166.2016.1271614>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2021). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Athahirah, A. U. (2024). Personal Political Branding for Electability Boost: The Evidence From Millennial Local Leaders in West Sumatera. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(3), 291–301. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i3.49657>
- Baihaqi, A., Muksin, N. N., Harmonis, F., Setiawan, A., & Karmila, L. (2022). Strategi marketing politik Bobby Nasution dan Aulia Rachman di media sosial pada Pilkada Kota Medan 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.56869/jikoba.v2i1.361>
- Bappenas. (2023). *Laporan Pembangunan Nasional*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damanik, D. D. I., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2022). Analisis Faktor Kemenangan Pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman pada Pemilihan Walikota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1519–1528.
- Denzin, N. K. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Remaja Rosdakarya.
- Dida, S., Setianti, Y., & Fatihah, G. (2018). Personal branding tri rismaharini the provision in media. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1(June), 303–307. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00088>
- Farhan, A., Omar, N. A., Jannat, T., & Nazri, M. A. (2020). The Impact of Political Brand Relationship



- Quality and Brand Engagement on Voters' Citizenship Behaviour: Evidence from Indonesia. *The South East Asian Journal of Management*, 14(1), 124–144. <https://doi.org/10.21002/seam.v14i1.12593>
- Fiorina, M. P. (1992). *Divided Government*. Macmillan.
- Hadjira, S., & Suranto, S. (2023). Personal Political Branding: Strategi Kampanye Ganjar Pranowo Untuk Pilpres 2024 di Social Media Twitter. *Jurnal Komunikatif*, 12(2), 181–199. <https://doi.org/10.33508/jk.v12i2.4907>
- Hall, R. A. (2024). National–Local Synergies for Development: How a Local Political Machine Delivered Infrastructure Results in Iloilo City. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(2), 286–307. <https://doi.org/10.1177/18681034241265724>
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2021). *The Routledge Handbook of Policy Design*. Routledge.
- Jain, V., Chawla, M., Ganesh, B. E., & Pich, C. (2018). Exploring and consolidating the brand personality elements of the political leader. *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, 22(3), 297–320. <https://doi.org/10.1108/SJME-03-2018-0010>
- Kementrian PUPR. (2023). *Laporan Infrastruktur Perkotaan*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd Editio). SAGE Publications.
- Lalancette, M., & Raynauld, V. (2017). The Power of Political Image: Justin Trudeau, Instagram, and Celebrity Politics. *American Behavioral Scientist*, 63(7), 888–924. <https://doi.org/10.1177/0002764217744838>
- Masik, G., Sagan, I., & Scott, J. W. (2021). Smart City strategies and new urban development policies in the Polish context. *Cities*, 108(June 2020), 102970. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102970>
- McNair, B. (2020). *An Introduction to Political Communication* (6th ed.). Routledge.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408.
- Nasution, F. A., Harahap, R. H., & Kusmanto, H. (2023). The Role of Leadership Performance Transformation in Managing Government: A Case Study in Medan City, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1659–e1659.
- Nimmo, D. (1989). *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Panjaitan, F. R., & Harahap, M. S. (2021). Community Opinion on the Personal Brand of Bobby Nasution to Prospective Medan Mayor in 2020. *Commicast*, 2(1), 76–80.
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.43-61>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Saragih, A. R., Prasetyo, A., Wahyuningsi, T., & Siregar, Y. D. (2024). Peran Guru Patimpus dalam Dinamika Pembentukan Kota Medan: Perspektif Sejarah Sosial dan Budaya. *Polyscopia*, 1(4), 200–206. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i4.1435>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udoh, E. S., & Luna-Reyes, L. F. (2025). Exploring the Impacts of Social and Technical Aspects of

- Governance on Smart City Projects. *Smart Cities*, 8(5), 1–20.  
<https://doi.org/10.3390/smartcities8050149>
- UNDP. (2022). *Governance and Public Perception Report*. United Nations Development Programme.
- Williams, G., Mahadevia, D., Schindler, S., & Chattaraj, S. (2021). Megaprojects, mirages and miracles: territorializing the Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC) and state restructuring in contemporary India. *Territory, Politics, Governance*, 11(3), 456–477.  
<https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1867630>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.